

**PENGARUH KOMPLEKSITAS DAERAH, UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KELEMAHAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH**  
*(Study Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera  
Utara tahun 2017-2019)*

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**MELIA ANDESTI**

**17043132**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH KOMPLEKSITAS DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH,  
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KELEMAHAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH**

*(Sudi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kab/Kota Di Provinsi Aceh Dan Sumatera  
Utara Tahun 2017-2019)*

**Nama** : Melia Andesti

**TM/NIM** : 2017/17043132

**Jenjang Pendidikan** : Strata 1 (SI)

**Jurusan** : Akuntansi

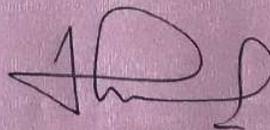
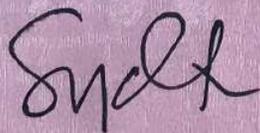
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, November 2021**

**Disetujui Oleh**

**Ketua Jurusan**

**Pembimbing**



**Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph. D**  
NIP 19800103 200212 2 001

**Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**  
NIP 19771123 200312 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah (*Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kab/Kota Di Provinsi Aceh Dan Sumatera Utara Tahun 2017-2019*)

**Nama** : Melia Andesti

**TM/NIM** : 2017/17043132

**Jurusan** : Akuntansi

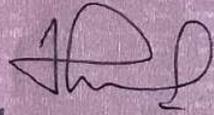
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

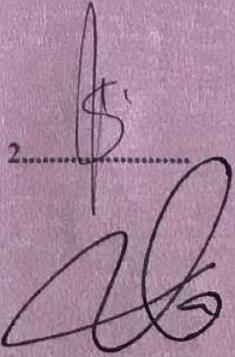
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, November 2021

**Tim Penguji**

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
-----	---------	------	--------------

1.	Ketua	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	1..... 
----	-------	-----------------------------	---

2.	Anggota	Salma Taqwa, S.E, M. Si	2..... 
----	---------	-------------------------	---

3.	Anggota	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	3.....
----	---------	---------------------------	--------

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melia Andesti  
TM/NIM : 2017/17043132  
Tempat/Tanggal Lahir : Sasak/ 17 Mei 1999  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Ujung Padang, Padang Halaban, Sasak  
No. HP/Telp. : 0812-6189-5825  
Judul : Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2021

Saya yang menyatakan



**Melia Andesti**  
NIM. 17043132

## ABSTRAK

**Andesti, Melia. (17043132/2017) Pengaruh Kompleksitas Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2017-2019)**

**Pembimbing : Henri Agustin, SE.,M.Sc.Ak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2017-2019. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, telah dipilih 156 pemerintah daerah sebagai sampel. Jenis informasi yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap internal mengendalikan kelemahan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal*

***Kata kunci : Kelemahan sistem pengendalian internal, kompleksitas, ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi.***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**". Skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Henri Agustin, SE.,M.Sc.Ak selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, motivasi dan kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Salma Taqwa, S.E, M.Si selaku dosen penguji 1 untuk penilaian, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.
3. Ibu Dr. Deviani, SE.,M.Si.Ak. selaku dosen penguji 2 untuk penilaian, arahan, kritik dan saran perbaikan untuk skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas semua kebijakan yang telah diterapkan.

5. Ibu Charoline Cheisvivany, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terutama dosen jurusan akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu selama proses belajar di kampus.
7. Abang Rizki selaku admin prodi akuntansi yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa Ayah Safriadi dan Ibu Rosmida, serta saudara tercinta (Lisa Devolti, M. Pd, Oki Fernando, S.pd, dan Huswatun Hasnah) yang tiada henti- hentinya mendoakan penulis, memberi dukungan, motivasi baik materil maupun moril dan selalu percaya pada jalan yang penulis pilih sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
9. DPH dan Pengurus Unit Kegiatan dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang tahun 2020 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Teman-teman akuntansi 2017 terutama Akuntansi D terkhusus ivo, via, iwid dan keluarga besar UKKPK UNP yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada

penulis serta dengan menyerahkan diri kepada-Nya, seraya mengharapkan ridho-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan skripsi ini yang jauh dari kesempurnaan ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis juga berharap masukan yang konstruktif guna perbaikan di masa datang. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, November 2021  
Penulis,

Melia Andesti

NIM. 17043132

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH .....	14
C.    TUJUAN.....	15
D.    MANFAAT PENELITIAN .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A.    KAJIAN TEORI .....	18
1. Teori Keagenan (Agency Theory) .....	18
2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) .....	20
3. Pengendalian Internal .....	21
4. Kompleksitas Daerah .....	33
5. Ukuran pemerintah daerah.....	37
6. Pertumbuhan Ekonomi .....	40
B.    PENELITIAN TERDAHULU .....	45
C.    KERANGKA KONSEPTUAL .....	47
D.    PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	55

A.	JENIS PENELITIAN .....	55
A.	POPULASI DAN SAMPEL .....	55
B.	JENIS DATA DAN SUMBER DATA .....	57
C.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	57
D.	DEFENISI OPERASIOAL DAN PENGUKURAN VARIABEL .....	58
E.	TEKNIK ANALISIS DATA .....	59
1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	60
2.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
3.	Uji Asumsi Klasik .....	61
4.	Uji Kelayakan Model .....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		65
A.	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	65
B.	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF .....	67
C.	ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA .....	69
D.	UJI ASUMSI KLASIK.....	70
1.	Uji Normalitas.....	70
2.	Uji Heterokedastisitas.....	71
3.	Uji Multikolinearitas .....	72
4.	Uji Autokorelasi .....	73
5.	Uji Kelayakan Model .....	74
E.	Pembahasan .....	79
BAB V.....		88
PENUTUP.....		88
A.	Kesimpulan .....	88
B.	Keterbatasan Penelitian .....	89
C.	Saran.....	89

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Penentuan Sampel Berdasarkan Kriteria.....	56
<b>Tabel 3.2</b> Nilai Durbin-Waston.....	62
<b>Tabel 4.1</b> Sampel Penelitian .....	65
<b>Tabel 4.2</b> Statistik Deskriptif.....	67
<b>Tabel 4.3</b> Analisis Regresi Linear Berganda .....	69
<b>Tabel 4.4</b> Uji Kolmogorov-Smirnov Test .....	71
<b>Tabel 4.5</b> Uji Multikolienaritas.....	73
<b>Tabel 4.6</b> Uji Autokorelasi .....	74
<b>Tabel 4.7</b> <i>Adjusted R Square</i> .....	74
<b>Tabel 4.8</b> Uji F (Simultan).....	76
<b>Tabel 4.9</b> Uji T (Parsial).....	77

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Konseptual .....	47
<b>Gambar 4.1</b> Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN: DATA PENELITIAN**

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal
2. Kompleksitas Daerah
3. Ukuran Pemerintah Daerah
4. Pertumbuhan Ekonomi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 mendorong perubahan dalam tatanan pemerintahan Indonesia termasuk dalam tata kelola keuangan pemerintahan, yang pada awalnya bersifat terpusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi atau disebut dengan istilah otonomi daerah. Dimana pada kebijakan ini terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya (Putri dan Mahmud, 2015). Hal ini terlihat dari disahkannya Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri, guna menciptakan kesejahteraan yang lebih merata kepada masyarakat dengan cara mengembangkan potensi daerahnya dan memberikan pelayanan dengan jarak lebih dekat (Alawiyah dkk, 2020). Namun disisi lain terlaksananya otonomi yang tersebar luas dalam pemerintahan yang ada di Indonesia juga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu (Subowo, 2020). Oleh karena itu pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya juga bertanggung jawab menyediakan pengendalian yang memadai mencakup semua aspek tata kelola

seperti implementasi anggaran, pengamanan sumber daya, akuntansi dan pelaporan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) serta menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional dalam mencapai tujuan institusi dan keberhasilan reformasi sektor publik.

Pengendalian intern merupakan proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bahwa suatu entitas telah mencapai tujuan dan sasarnya secara tepat dan efisien (Valery G. Kumaat, 2011: 16). Pengendalian internal penting untuk diselenggarakan secara optimal guna menjaga keamanan aset negara dari pencurian, mendorong efisiensi dalam pencapaian tujuan, serta meningkatkan ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam laporan. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan kebijakan atau aturan yang dijadikan sebagai alat untuk mengontrol kegiatan serta mengamankan aset negara dari berbagai tindak kecurangan (*fraud*).

Adapun dasar Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan di Indonesia diatur dalam PP No 60 tahun 2008 yang mana dalam implementasinya SPIP harus memperhatikan norma keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas serta fungsi dari instansi pemerintah yang terkait. Pelaksanaan pengendalian internal yang baik adalah dengan menerapkan semua unsur pengendalian intern yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (Yaya dan Halim, 2019).

Pelaksanaan pengendalian intern yang baik berdasarkan PERMENDAGRI NO 13 tahun 2006 adalah jika implementasi pengendalian intern memenuhi beberapa

kriteria yang dirincikan pada ayat 2 (dua) yaitu terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi maka pengendalian internal bisa dikatakan telah berhasil dijalankan.

Pelaksanaan pengendalian intern yang tidak optimal akan menyebabkan lemahnya pengendalian intern sehingga dengan timbulnya kelemahan pengendalian intern itu akan mengakibatkan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan (Sutaryo dan Sinaga, 2018). Merujuk pada Peraturan badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia No 01 tahun 2007 tentang standar pemeriksaaan keuangan negara disebutkan bahwasanya sistem pengendalian intern dapat dikategorikan lemah apabila terjadi kekurangan material dalam desain dan implementasi pengendalian intern. Kondisi yang menyangkut dengan kekurangan material desain pengendalian internal diantaranya ialah, tidak memadainya desain pengendalian intern secara keseluruhan, tidak adanya pemisahan tugas yang semestinya dan konsisten dengan tujuan, tidak adanya review dan persetujuan transaksi, tidak memadainya prosedur untuk menetapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tidak memadainya ketentuan untuk perlindungan keamanan.

Adapun kondisi yang menyangkut dengan implementasi pengendalian internal diantaranya kegagalan sistem dalam mendeteksi salah saji dalam informasi akuntansi, bukti sistem gagal dalam menyediakan keluaran yang akurat konsiten dengan tujuan institusi, bukti kegagalan sistem dalam melindungi keamanan aset dari kerugian,

bukti adanya usaha oknum berwenang melanggar sistem pengendalian intern guna merusak tujuan keseluruhan sistem, terdapatnya manipulasi, pemalsuan dan pengubahan catatan akuntansi atau bukti pendukung, adanya kesengajaan salah penerapan prinsip akuntansi yang berlaku, adanya karyawan yang tidak memenuhi persyaratan kecakapan dan pelatihan untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepada mereka. Jika terjadi kesalahan material seperti yang dijelaskan pada situasi yang terdapat pada dua kondisi tersebut maka pengendalian intern pemerintah daerah dapat dikategorikan mengalami kelemahan.

Selain tidak tercapainya tujuan entitas dampak lain yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal ialah dapat meningkatkan resiko kecurangan (*fraud*) dan tidak dipatuhinya peraturan perundangan yang berlaku sehingga akan berpotensi menimbulkan kerugian negara atau daerah (Sutaryo dan Sinaga, 2018). Karena sebagian besar faktor pemicu kecurangan (*fraud*) pada lingkup organisasi baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal sektor itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2018) yang menyebutkan berbagai tindak kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah seperti masih banyak data yang tidak sesuai dengan semestinya, angka-angka fiktif yang terdapat dalam laporan keuangan atau tidak berdasarkan bukti dan transaksi sebenarnya yang mana atas beragamnya penyimpangan tersebut disebabkan oleh penerapan pengendalian internal yang masih lemah atau belum berjalan baik.

Hasil KPMG Fraud Survey 2006 yang dilakukan di Carolina Amerika Serikat yang dikutip dalam penelitian Martani dan Zaelani (2011) juga menemukan bahwa

faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya peluang kecurangan adalah lemahnya pengendalian intern, dimana sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi disebabkan karena lemahnya pengendalian intern. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pane (2018) menemukan bahwa implementasi pengendalian intern yang lemah akan membuka celah terjadinya tindak kecurangan (*Fraud*) karena implementasi pengendalian internal yang berjalan dengan baik akan membentuk lingkungan pengawasan yang terkendali dalam setiap aktivitas yang dilakukan sehingga akan menekan peluang terjadinya *fraud*.

Di Indonesia sendiri pengimplementasian sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah masih tergolong lemah. Jika dilihat dari segi aturan yang mengatur tentang implementasi sistem pengendalian internal daerah telah cukup jelas dan tidak terdapat kelemahan dalam aturannya, seterusnya kelemahan itu terletak pada pengimplementasian pengendalian intern yang tidak optimal oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya kelemahan pengendalian intern. Kelemahan pengimplementasian pengendalian internal pada pemerintah daerah di Indonesia bisa dilihat dari hasil pemeriksaan BPK mengenai kelemahan SPIP yang terus meningkat dari tahun ketahun. Dalam IHPS Semester I 2019 dirincikan hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD di Indonesia. Dimana terdapat temuan kelemahan SPIP sebanyak 5.858 temuan, yang mana dari jumlah temuan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis kasus kelemahan SPIP yaitu sebanyak 22% temuan kelemahan struktur pengendalian intern, 31% temuan kelemahan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan, dan 47% temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja. Dari total temuan kelemahan pengendalian internal pemerintahan daerah yang ada jumlah temuan kelemahan pengendalian internal pemerintahan daerah paling banyak ditemukan pada pemerintahan daerah yang berada di pulau sumatra yang didominasi oleh Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (*Sumber IHPS Semester I 2019*).

Selain itu kondisi lemahnya pengendalian intern pada pemeritahan daerah yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga tercermin dari sejumlah temuan kasus penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum berwenang yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian internal. *Indonessian Corruption Watch* (ICW) mencatat sejumlah kasus penyimpangan dan tindak pidana korupsi yang terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal seperti kasus penyelewengan dana otus pada Provinsi Aceh yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada tahun 2018 yang disebabkan oleh lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintahan Aceh. Selanjutnya kasus penyelewengan dana bansos dan hibah yang terjadi pada Sumatera Utara senilai 247M ditemukan oleh tim penyidik kejakung pada tahun 2015, dimana penyelewengan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan SPJ penyaluran bansos yang tidak sesuai ketentuan, hal ini disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD akibat penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja.

Dengan tingginya temuan kasus yang terkait kelemahan pengendalian intern tentu tidak sejalan dengan tekad pemerintah yang ingin mewujudkan suatu

pemerintahan yang bersih dan akuntabel. maka dari itu penting untuk mengetahui faktor apa saja yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kelemahan implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah diantaranya penelitian Alawiyah, dkk (2020) yang meneliti hubungan ukuran pemerintah daerah, PAD, belanja modal dan jumlah penduduk, terhadap kelemahan pengendalian internal, Petrovits (2010) meneliti pengaruh ukuran, auditor, umur perusahaan, pertumbuhan dan resiko keuangan terhadap kelemahan pengendalian internal. Amir Mahmud dan Saputro, (2015) meneliti pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, kompleksitas daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah, Majid, dkk (2017) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal.

Adha, dkk (2019), Hartono, dkk (2015) dan MA. Omri & GEM ben Nefissa (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern sementara itu Putri dan Mahmud (2015) dan martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah telah dilakukan oleh Petrovits, dkk (2010) dan Putri dan Mahmud (2015) yang mana dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan

pengendalian intern sementara itu penelitian Tina Tuti Alawiyah, dkk (2020) menemukan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah. Kemudian J Doyle, dkk (2007) dan Majid, dkk (2017) melakukan penelitian dalam melihat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern, dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern sementara itu Nurwati dan Trisnawati (2015) dan Yaya dan Suprobo (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian ini mengkaji kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi dalam melihat keterkaitannya terhadap kelemahan SPIP. Alasan peneliti mengambil tiga variabel tersebut adalah yang pertama, dalam PP 60 tahun 2008 tersirat bahwa implementasi pengendalian intern disesuaikan kompleksitas masing-masing daerah, karenanya peneliti menilai kompleksitas daerah ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kelemahan SPIP namun penelitian sebelumnya belum menunjukkan hasil yang konsisten. Peneliti menilai hal tersebut disebabkan oleh penggunaan proksi yang kurang tepat dan waktu pengamatan yang terlalu singkat. Karenanya pada penelitian ini peneliti tertarik mengambil variabel kompleksitas dan memproksikanya dengan jumlah kecamatan, yang merujuk pada penelitian petrovits, dkk 2010 dimana menggunakan segmen usaha sebagai proksi dari pada kompleksitas kemudian agar hasil penelitian lebih akurat peneliti memperpanjang tahun pengamatan sampel menjadi tiga tahun.

Kedua, alasan peneliti mengambil variabel ukuran pemerintah daerah adalah berdasarkan saran pada penelitian sebelumnya yang menyarankan untuk memasukan variabel ukuran pemerintah daerah dengan menggunakan total aset sebagai proksi dari pada ukuran pemda. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi pada penelitian yang akan dilakukan dikarenakan variabel tersebut masih sangat sedikit yang meneliti dalam melihat keterkaitanya dengan kelemahan pengendalian intern pada pemerintahan daerah yang berada di Pulau Sumatera khususnya pada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terlebih lagi dalam *statitital year book of Indonesia* terlihat tren pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat pada perovinsi aceh dan sumatera utara selama tiga tahun terakhir meskipun pada pemerintahan aceh sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,46% namun penurunan tersebut tidak terlalu rendah, selain itu dalam PP 60 tahun 2008 juga disebutkan bahwa perubahan ekonomi suatu entitas dapat menimbulkan resiko pada implementasi pengendalian internal karenanya peneliti tertarik memasukan variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah adalah kompleksitas daerah. Kompleksitas daerah dapat diukur dengan jumlah kecamatan (Martani dan Zaelani, 2011). Kecamatan dalam menjalankan kewenanganya untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dan menyelenggarakan pelayanan publik, juga bertanggung jawab untuk menjalankan pengendalian internnya di area kerjanya masing-masing guna mengendalikan seluruh

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan agar terciptanya keandalan pelaporan keuangan kecamatan, pengamanan aset dan kepatuhan terhadap pertauran perundang-undangan. Tingginya kompleksitas pemerintahan daerah diduga akan menimbulkan masalah dalam penerapan pengendalian internal. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyebutkan bahwa tingginya kompleksitas yang terdapat pada suatu daerah menyebabkan tingkat pengawasan terhadap pengendalian intern yang dijalankan menjadi rendah. Tingginya kompleksitas pemerintahan daerah yang ditandai dengan banyaknya jumlah kecamatan yang memiliki letak area kerja yang tersebar menyebabkan kegiatan yang dikendalikan akan semakin banyak sehingga konsistensi penerapan pengendalian intern yang sesuai ketentuan pada setiap kecamatan akan sulit diawasi oleh pemda, dan memungkinkan pengawasan yang dilakukan kurang maksimal.

Akibat tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemda terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal pada kecamatan menyebabkan proses pemantauan yang dilakukan oleh kecamatan melalui penilaian terhadap pengendalian internal tidak berjalan baik yang berdampak pada tidak terpetakanya permasalahan pengendalian internal yang terjadi pada kecamatan. Sehingga akan mengakibatkan kegiatan pengendalian internal tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya yang menimbulkan masalah kelemahan pengendalian internal meningkat pada pemerintahan daerah. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaya dan halim (2019) yang menemukan kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah.

Faktor kedua adalah ukuran pemerintah daerah. Panjaitan (2004) dalam Majid, dkk (2017) menjelaskan salah satu tolok ukur yang bisa dijadikan untuk menentukan besar kecilnya suatu entitas adalah total aset. Berdasarkan teori stakeholder dijelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang berukuran lebih besar akan memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar pula sehingga dianggap lebih mampu menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Karena besarnya total aset yang dimiliki oleh pemda jika dikelola dengan baik akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan membantu pemda dalam memberi pelayanan yang memadai kepada masyarakat (saraswati dan Rioni, 2019). Sehingga besarnya aset yang dimiliki akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah dalam meningkatkan pengawasan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian internal yang optimal untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki dari segala bentuk kecurangan agar upaya untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat dapat tercapai (Hartono, dkk 2014).

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar akan memiliki sumber daya yang besar pula yang dialokasikan untuk kepentingan instansi seperti melakukan *maintenance* terhadap sistem pengendalian intern (Putri dan Mahmud, 2015). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan diklat atau *training* yang memadai secara berkala untuk memberikan pemahaman terkait sistem pengendalian intern yang dibangun kepada seluruh pegawai maupun pimpinan instansi pemerintah agar

mampu melaksanakan pengendalian intern yang lebih optimal sehingga akan mengurangi masalah kelemahan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Petrovits, dkk (2010) dan Adha, dkk (2019) menemukan ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah artinya semakin besar ukuran suatu organisasi akan semakin rendah temuan terhadap kelemahan pengendalian internal.

Faktor selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, adapun pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB suatu daerah (Bodieono, 1985) dalam (Majid, dkk, 2017). Pertumbuhan ekonomi akan ditandai dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam menggerakkan sektor perekonomian berdasarkan potensi yang ada melalui pengalokasian belanja yang tepat dengan memprioritaskan pada sektor ekonomi produktif (Majid, dkk, 2017), seperti memberikan sarana dan prasarana yang mendukung jalanya sektor industri atau memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan resiko terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu karenanya pemerintah dalam menggerakkan sektor perekonomian melalui pengalokasian belanja yang tepat akan membutuhkan penyesuaian pengendalian internal menjadi lebih kompleks serta penerapan pengawasan yang baik (Hartono, dkk, 2015). Doyle, Ge dan McVay (2007) menyebutkan proses penyesuaian kegiatan pengendalian intern akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Selama rentang waktu penyesuaian pengendalian intern tersebut akan

memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam pemerintah daerah, yang menyebabkan lemahnya pengendalian intern, (Martani dan Zaelani, 2011). Majid, dkk (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa resiko kelemahan pengendalian intern cenderung lebih banyak ditemukan pada pemerintahan daerah yang sedang bertumbuh, sementara pada pemda yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan seperti Kabupaten Enrekang, memiliki temuan kelemahan pengendalian internal yang lebih rendah.

Penelitian mengenai kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah penting dilakukan, karena pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintah yang belum serius dijalankan terkhususnya pada pemerintahan Provinsi Aceh dan Sumatera utara yang memiliki temuan kasus kelemahan pengendalian internal yang cukup tinggi, hal ini tentu akan bertolak belakang dengan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi tuntutan yang diberikan oleh publik kepada pemerintah yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana hal tersebut dapat tercapai melalui penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Selain itu akibat yang ditimbulkan dari kelemahan sistem pengendalian intern juga sangat fatal seperti menimbulkan kerugian pada daerah atau negara dengan jumlah yang terbilang cukup besar.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian yang digunakan yaitu dilakukan pada pemerintahan daerah yang

berada pada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang sebelumnya masih jarang dilakukan dan bahkan belum pernah dilakukan pada pemerintahan daerah Provinsi Aceh. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun pengamatannya yang mana dalam penelitian ini peneliti melihat faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pada pemerintahan kab/kota tahun 2017-2019 yang sebelumnya kebanyakan hanya dilakukan selama satu tahun pengamatan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menguji apakah kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sehingga penelitian ini diberi judul "**Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (*Study Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2017-2019*)**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintahan daerah tingkat kab/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara?

2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintahan daerah tingkat kab/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintahan daerah tingkat kab/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menguji sejauh mana kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintahan daerah tingkat kab/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui serta menguji sejauh mana ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintahan daerah tingkat kab/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui serta menguji sejauh mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintahan daerah tingkat kab/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau manfaat kepada:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah pada kab/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengimplementasian sistem pengendalian internal dan menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pengimplementasian sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan efektifitas SPIP dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah

3. Peneliti Selanjutnya

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kepada peneliti selanjutnya dalam memperoleh referensi terkait "Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran pemerintah daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah"